



Beyond Protest Voting: Membaca Pesan Tersembunyi di Balik Suara Tidak Sah

Wegik Prasetyo¹✉

¹ Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima
Disetujui
Dipublikasi 15 Juli 2017

Keywords:
Unauthorized Voice Mail;
Electoral Systems; Protest
Voting

Abstrak

Tulisan ini terkait penggunaan tanda dan simbol sebagai protest voting dalam suara tidak sah Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tulisan ini mengintepretasikan pesan-pesan tersembunyi yang disampaikan pemilih melalui surat suara. Artikel ini memberi kontribusi untuk mengatasi dua permasalahan sekaligus, yakni konseptual dan praktis. Secara konseptual, ada gap dalam kajian protest voting selama ini. Protest voting menjelaskan voting tidak hanya digunakan untuk mendukung kandidat atau partai namun dapat diartikan sebagai bentuk protes. Namun dalam tulisan ini, protes tidak disampaikan melalui voting melainkan melalui tanda, simbol, ataupun pesan dalam surat suara. Secara praktis, ada permasalahan sistem pemilu dalam melihat suara rakyat. Sistem pemilu saat ini menyamaratakan cara pandang melihat suara tidak sah. Padahal di dalam surat suara tidak sah, terdapat pesan-pesan tersembunyi yang merupakan bagian dari suara rakyat dan merupakan esensi dari pemilu itu sendiri. Tulisan ini menunjukkan pesan-pesan tersebut tidak tertampung oleh sistem pemilu saat ini. Pesan-pesan tersebut meliputi pesan atas indikasi terjadinya politik uang post-elections, bentuk ekspresi senang pemilih yang disampaikan dalam surat suara, adanya umpatan dan hujatan yang disampaikan pemilih, adanya penolakan terhadap kandidat, dan adanya penolakan terhadap sistem pemilu saat ini.

Abstract

This article related to the use of signs and symbols as a protest vote beyond the invalid votes of the presidential election 2014 in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). This paper will interpret the hidden messages conveyed by voters through a ballot. This article contributes to solve two problems at once, the conceptual and practical. Conceptually, there is a gap in the study of protest voting. Protest voting describes that voting as not only used to support candidates or parties but can be used as a form of protest. However, in this paper the protest was not conveyed through voting but using signs, symbols, or messages in ballot. Practically, there are problems in the electoral system on viewing people votes. The current electoral system generalizes the approach on viewing invalid votes. Whereas, there some hidden messages of people votes and the essence of the election itself beyond the invalid ballot papers. This paper shows that these messages can not be accommodated by the current electoral system. Those include an indication of post-election money politics, expressions of blissful voters delivered on the ballot, the expletives and insults expressed by voters, a rejection of the candidates, and also a rejection for the current electoral system.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

ISSN 2477 – 8060

✉Alamat korespondensi:

Glagah Kidul RT 03, Tamanan, Banguntapan, Bantul. Email: wegikprasetyo21@gmail.com.

Pendahuluan

Tulisan ini mengulas pesan-pesan yang disampaikan pemilih lewat surat suara dalam Pilpres 2014, dengan melihat kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi pada kajian tentang *protest voting* yang berkembang selama ini. *Protest voting* selama ini selalu dimaknai sebagai tindakan *voting* untuk menyampaikan protes atau ketidaksetujuannya dengan hal-hal yang terkait pemilu. (misal Bowler & Lanoue, 1992; McAllister & White, 2008; Kselman & Niou, 2011; Kang, 2010; Pop-Eleches, 2010; Kang, 2004; Moral, 2016; Ouweneel & Veenhove, 2016; Strazzer, Genius, Scarpa, & Hutchinson, 2003; Myatt, 2015; Hooghe & Dassonneville, 2016). Sasaran protes pemilih dalam tindakan *protest voting* biasanya adalah kandidat yang bertarung dalam pemilu, tim sukses, sistem pemilu, atau bahkan sistem politik secara keseluruhan. Pemberian suara yang biasanya dilakukan dengan tujuan memenangkan kandidat tertentu, namun dalam konsep ini pemberian suara dapat dilihat sebagai bentuk protes pemilih.

Protes pemilih tersebut mengekspresikan pandangan politik terkait tentang personal kandidat, program-program kandidat, tim sukses, partai pengusung, sistem pemilu, ataupun keadaan politik selama ini. Implikasi dari *protest voting* yang diharapkan adalah tersampainya suara protes tersebut kepada subyek maupun obyek yang diprotes. Jika suara-suara protes tersebut diberikan

secara *massive*, bukan tidak mungkin mampu mengubah hasil akhir perolehan suara yang berbeda dari prediksi mayoritas selama ini.

Protest voting dilakukan dengan memberikan suara kepada kandidat yang sebenarnya tidak disukai. Tindakan tersebut dilakukan bukan untuk memenangkan kandidat yang tidak disukai, melainkan ditujukan untuk memberikan sinyal khusus kepada kandidat yang disukai. Pemilih tidak puas atas tawaran program, gagasan, tim sukses, bahkan secara personal maupun partai pengusung dari kandidat yang disukai. Ketidakpuasan tersebut kemudian diterjemahkan pemilih dengan memberikan suara untuk kandidat yang tidak disukai sebagai sinyal khusus. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan protes kepada kandidat yang sebenarnya disukai.

Terkait dengan hal itu, Kselman & Niou (2011) mengatakan: “...*that individuals may use their votes to send a specific and targeted signal of dissatisfaction to one or more important political actors...*” Selain itu, pemilih yang memberikan suara kepada kandidat lainnya menganggap kandidat maupun partai mengabaikan isu-isu penting. “*Citizens who cast a third party ballot do so to advance the same policy goals they were precluded from achieving from within the major parties. When voters perceive the major parties to be mutually ignoring an important issue they will cast a third party vote to voice this displeasure.*”

Selain itu, *protest voting* dapat dilakukan dengan pemilih tidak memberikan suara sahnya. Hal itu bisa dilakukan dengan tidak memilih kandidat atau memilih semua kandidat. Ada dua cara pandang dalam melihat ini, negatif dan positif. Secara negatif, tindakan ini dimaknai sebagai penolakan. Hal ini dikarenakan pemilih tidak suka dengan personal, program, ataupun semua partai pengusung. Pemilih ingin mengatakan bahwa semua kandidat tidak ada yang layak untuk menang. Selain itu, hal tersebut dapat dimaknai lebih luas sebagai penolakan terhadap sistem pemilu.

Terkait hal itu, McAllister & White (2008) mengatakan: *“They do not reject liberal democracy, but are critical of the contemporary practice of Russian politics and find no parties that adequately reflect their views. With the ending of the ‘against all’ facility in 2006 and other changes in the Russian electoral system under the Putin presidency, levels of turnout are likely to fall further and the protest vote will seek other outlets within or outside the parliamentary system”*. Pemilih memberikan suara kepada semua kandidat untuk memprotes keadaan politik yang sedang terjadi dan cara pandang yang tidak terwakili oleh semua kandidat yang ada. Gagasan terkait memberikan suara kepada semua kandidat juga diungkapkan oleh Pop-Eleches (2010) *“A protest vote (or antivote) is an electoral option driven less by the positive appeal of the chosen party’s*

ideological/policy platform than by the rejection of other possible political choices.”

Secara positif, tindakan ini dimaknai sebagai penerimaan. Pemilih menerima apapun hasil pemilu. Penerimaan ini dapat dimaknai sebagai pemilih merasa semua kandidat berkualitas layak menang, pemilih merasa siapapun yang menang sama saja, atau pemilih kebingungan untuk menentukan pilihan atas kandidat. Kedua cara pandang tersebut; penolakan ataupun penerimaan, merupakan sebuah bentuk protes dengan tidak memberikan suara sah saat hari pemungutan.

Konsep *protest voting* tersebut menjelaskan bentuk *voting* yang ditujukan untuk memprotes hal terkait pemilu. Kelemahan konsep tersebut terletak pada ketidakmampuannya dalam membaca maksud dan makna dari pesan yang disampaikan melalui pemberian suara. Pemilih dapat mengirimkan pesan protes apapun melalui *voting*, namun pesan protes tersebut tidak akan memiliki makna karena sistem tidak mampu membacanya. Sistem hanya membaca suara tersebut sebagai suara sah atau suara tidak sah (Medium, 2016). Dalam suara tidak sah, sistem tidak mampu membedakan suara tidak sah yang memang tidak sesuai regulasi dengan suara tidak sah yang dimaksudkan sebagai bentuk protes. Sistem melihat suara tidak sah sebagai sesuatu yang sama; tidak sah maka tidak dihitung.

Kegagalan sistem membaca pesan pada surat suara dan memberlakukannya sebagai surat suara tidak sah, sebenarnya

mencoreng esensi dari pemilu itu sendiri. Esensi dari pemilu adalah sarana untuk menyampaikan suara rakyat dalam memilih pemimpin. Rakyat mempunyai berbagai macam cara untuk menyampaikan pesan. Regulasi pada saat Pemilu Presiden 2014 hanya mengakomodir sistem coblos untuk menentukan suara rakyat tersebut sah atau tidak. Jika surat suara tersebut dicoblos sesuai regulasi, maka suara rakyat tersebut sah. Jika surat suara dicoblos tidak seperti regulasi, maka suara rakyat tersebut tidak sah dan gugur. Hal tersebut sangat membatasi rakyat dalam menyampaikan suara; mencederai suara rakyat.

Kelemahan dalam konsep *protest voting* tersebut menjadi objek yang dikritik melalui konsep yang ditawarkan penulis melalui pendekatan interpretatif. Dengan menggunakan pendekatan interpretatif tersebut, penulis membaca dan memaknai pesan-pesan tersurat maupun tersirat dalam surat suara tidak sah; konteks Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pesan-pesan tersembunyi di surat suara tidak sah tersebut diungkap melalui metode analisa interpretatif. Uraian-uraian di bawah ini berusaha menjelaskan pesan-pesan tersembunyi dibalik suara tidak sah tersebut.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif biasanya dipisahkan menjadi tiga bentuk yaitu *discourse analysis*, *semiotic analysis*, dan

framing analysis. Setiap bentuk pendekatan tersebut memiliki kelebihan masing-masing, namun kesemuanya terhubung dalam proses pencarian ideologi, kesadaran, dan hegemoni atas pesan-makna di dalam teks. Ideologi adalah sebuah sistem ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi. Kesadaran adalah esensi atau totalitas dari sikap, pendapat, perasaan yang dimiliki oleh pembawa pesan. hegemoni adalah proses ideologi “dominan” disampaikan, kesadaran dibentuk, dan kuasa sosial dijalankan (Lull dalam Sobur, 2001: 61). Sehingga batasan diantara ketiga pendekatan tersebut sangat tipis, tidak kaku, sangat cair, bahkan terkesan tidak ada batasan. Dalam pendekatan ini teks dimaknai sangat luas. Segala cipta tangan manusia baik itu gambar, video, tulisan, ataupun karya seni itulah yang dimaksud dengan teks. Teks dipandang sebagai medium penyampai pesan. Jadi ada kandungan pesan di dalam teks tersebut.

Melalui pendekatan interpretatif tersebut tulisan ini menganalisis dan membaca pesan-pesan yang tersembunyi; ideologi, kesadaran, dan hegemoni, dalam surat suara tidak sah Pilpres 2014 di DIY. Tulisan ini sepenuhnya menggunakan data hasil penelitian *Research Centre for Politics and Government* (PolGov) DPP UGM bekerjasama dengan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); penulis sendiri terlibat langsung sebagai asisten peneliti. Penelitian tersebut bertujuan untuk melacak Pola Surat Suara Tidak Sah Pemilu Presiden 2014 di

DIY. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu Mei-September 2016 dengan membongkar gudang penyimpanan surat suara di seluruh KPU Kabupaten/Kota di DIY.

Setidaknya ada enam hal yang dibahas dalam tulisan ini yaitu: tematik (apa yang dikatakan?), skematik (bagaimana pendapat disusun dan dirangkai), semantik (makna yang ingin ditekankan dalam teks?), sintaksis (bagaimana pendapat disampaikan?), stilistik (pilihan kata apa yang dipakai?), retorik (bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan?) (Eriyanto, 2008). Selain menekankan masalah yang hendak diulas, pendekatan interpretatif memberikan penekanan kepada unsur yang menjadi pusat perhatian penafsiran teks secara kontekstual, yaitu (Sudibyo, Hamad, Qodari dalam Sobur, 2001: 148): Medan Wacana (*field of discourse*) yaitu menunjuk pada hal/peristiwa yang terjadi, Pelibat Wacana (*field of discourse*) yaitu menunjuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks, dan Sarana Wacana (*mode of discourse*) yaitu menunjuk pada penggunaan tata bahasa.

Penggunaan setiap unsur yang disebutkan di atas sangat flexibel tergantung obyek teks yang diteliti. Hal ini dikarenakan setiap gambar memiliki dimensi yang berbeda untuk memahami makna. Perlu ditekankan bahwa unsur-unsur tersebut hanyalah alat bantu untuk mengidentifikasi makna dan kemudian dikaitkan dengan *framing* yang ada. Namun, di sisi lain tulisan ini juga memberi limitasi terhadap beberapa aspek. Pertama,

penulis kesulitan bertemu dengan pemilih sebagai aktor utama surat suara tidak sah. Kedua, penulis tidak mendalami konteks sosial masyarakat dimana surat suara tidak sah tersebut ditemukan.

Pesan-Pesan Tersembunyi di Pilpres 2014

Selama ini surat suara tidak sah hanya dianggap sebagai kegagalan penyampaian suara. Padahal seringkali apa yang termuat dalam surat suara tidak sah bisa jadi adalah tanda atau pesan yang merepresentasikan suara rakyat. Secara prosedural pemberian tanda atau pesan pada surat suara merupakan tindakan yang menyalahi aturan pemilu. Namun, secara substansial hal tersebut tidaklah melanggar karena salah satu prinsip pemilu adalah suara rakyat suara Tuhan. Sehingga apapun bentuknya, suara tersebut haruslah dihargai.

Bagian ini membahas pesan-pesan apa saja yang berhasil ditangkap dalam surat suara tidak sah pada Pilpres 2014 di DIY. Dalam bahasan, setidaknya ada tiga pengelompokan surat suara tidak sah. Surat suara tidak sah yang dimasukkan dalam pengelompokan tersebut hanyalah surat suara tidak sah yang memiliki tanda khusus; tanda yang diberikan diluar cara prosedural. Pertama, surat suara yang memiliki lubang besar pada wajah kandidat. Kedua, coblosan yang membentuk pola; pola tertentu ataupun pola acak. Ketiga, surat suara yang memiliki coretan. Berikut ini pembahasan tiga kelompok surat suara tidak sah dengan tanda

husus yang dianalisis menggunakan pendekatan interpretatif.

Lubang Besar pada Wajah/Nomor Urut Calon

Gambar 1. Bolong Muka A.



Sumber: Dokumentasi Tim PolGov

Surat suara tidak sah tersebut memiliki pola kerusakan yang sama yakni adanya lubang yang menghilangkan muka calon presiden. Pola kerusakan tersebut jelas mengatakan bahwa dengan secara sengaja pemilih melubangi surat suara bukan dengan alat yang disediakan KPU. KPU hanya menyediakan paku ukuran sedang yang memiliki diameter kecil. Kerusakan tersebut ada yang disobek manual dengan tangan; terlihat tidak rapinya lubang yang terbentuk, adapula yang dilubangi dengan suatu alat tertentu; terlihat rapinya lubang yang terbentuk.

Pertanyaannya kemudian mengapa pola tersebut muncul? Makna apa yang terkandung didalamnya? Untuk melihat hal tersebut perlunya membaca komentar-komentar interpretatif di sekitar isi manifestasi. Hal tersebut diperlukan agar tanda dan pola tersebut mendapatkan bingkai yang tepat dan sesuai konteks. Upaya membongkar makna haruslah memperhatikan medan wacana;

merujuk pada peristiwa yang terjadi, terlibat wacana; merujuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks, dan sarana wacana; merujuk pada tata bahasa.

Gambar 2. Bolong Muka B.



Sumber: Dokumentasi Tim PolGov

Pola tersebut terjadi di surat suara tidak sah Pilpres 2014 di DIY. Pilpres 2014 merupakan kontestasi yang cukup sengit antara Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Saking sengitnya, pertarungan pilpres sampai kepada ranah simpatisan dan masyarakat. Bahkan sampai paska Pilpres 2014, masyarakat saat ini seperti masih terbelah menjadi dua yaitu masyarakat yang *pro* kepada Jokowi dan masyarakat yang kontra Jokowi. Selain sengitnya pertarungan antar elit dan antar masyarakat, Pilpres 2014 juga diindikasikan dengan berlangsungnya politik uang yang cukup massif (Republika, 2014). Persaingan yang ketat dan masifnya politik uang di Pilpres 2014 diyakini turut andil memunculkan pola kerusakan surat suara tersebut. *Framing* inilah yang perlu dilihat lebih dalam agar pesan dalam gambar sesuai dengan konteks.

Bambang Eka (mantan anggota Bawaslu RI) mengungkapkan bahwa munculnya pola kerusakan surat suara tidak

sah tersebut ditengarai karena adanya politik uang. Hal ini menarik karena praktik politik uang yang dilakukan berbeda dari praktik pada umumnya. Biasanya politik uang dilakukan sebelum pemungutan suara. Namun dalam kasus ini, politik uang dilakukan setelah proses pencoblosan. Praktik ini diintegrasikan sebagai politik uang *post-elections*. Politik uang *post-elections* ini dilakukan dengan menjadikan wajah calon dari surat suara sebagai bukti telah memberikan suara. Sobekan wajah calon tersebut kemudian ditukarkan dengan uang oleh para pemilih. Sebuah praktik baru dalam perkembangan politik uang di Indonesia.

Permasalahan utama praktik politik uang selama ini adalah relasi yang terbangun merupakan relasi tunggal (*one-off*). Sehingga elemen timbal balik kadang tidak terjadi karena si penerima pemberian tidak merasa terbebani untuk membalas pemberian sang patron dengan cara si penerima memilih sang patron dalam pemilu. Dalam relasi tersebut tidak ada mekanisme yang dapat memastikan politik uang berkorelasi positif dengan perolehan suara. (Aspinall & Sukmajati, 2015). Politik uang *post-elections* diduga digunakan untuk memastikan relasi berjalan dua arah. Untuk mendapatkan uang yang dijanjikan, pemilih harus terlebih dahulu mencoblos calon yang telah ditentukan. Pemilih membuktikan telah memilih calon yang ditentukan dengan membawa potongan wajah calon atau nomor urut surat suara. Dengan mekanisme tersebut, relasi yang

terjalin dari politik uang diharapkan dapat terjadi dua arah.

Indikasi pola kerusakan tersebut mengarah ke politik uang sangatlah kuat. Pola kerusakan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di DIY menunjukkan bahwa pola ini terstruktur dan sistematis; seperti halnya politik uang. Indikasi tersebut diperkuat dengan multitafsirnya peraturan KPU tentang sah atau tidaknya surat suara (Karim, et al., 2016). Di level teknis pelaksanaan, masih ditemukannya perbedaan pendapat tentang sah dan tidak sahnya suara. Salah satu celah dari peraturan KPU dalam pola kerusakan ini adalah *surat suara tidak sah jika dicoblos bukan dengan alat yang disediakan KPU*. Subyektifitas petugas KPPS akan sangat menentukan apakah lubang pada surat suara dicoblos dengan alat yang disediakan KPU atau bukan. Subyektifitas inilah yang akan menentukan sah atau tidaknya suara. Semua penjelasan di atas, pembacaan atas pola kerusakan surat suara ini mengarah dan mengindikasikan adanya praktik politik uang.

Coblos Banyak pada Surat Suara

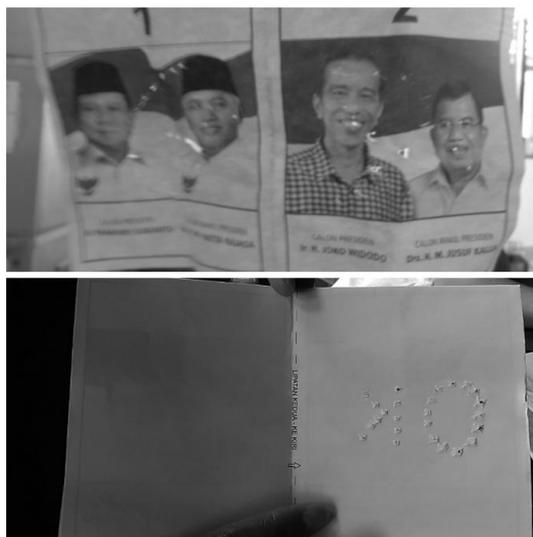
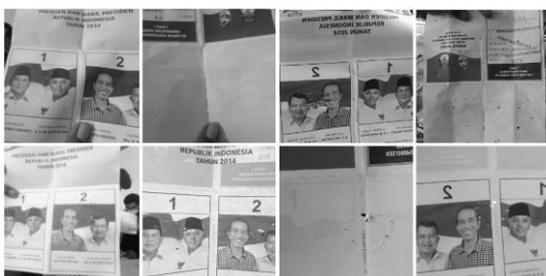
Surat suara tidak sah tersebut memiliki pola kerusakan yang sama yakni adanya banyak coblosan pada kertas surat suara. Pola kerusakan menunjukkan bahwa dengan secara sengaja pemilih mencoblos berulang kali pada surat suara. Dari pola tersebut, setidaknya ada dua tipe coblosan yang dihasilkan yakni coblos banyak pada

satu pasangan calon dan coblos banyak pada semua pasangan calon.

Coblos banyak pada semua paslon jelas merupakan suara tidak sah. Melalui coblos banyak dengan pada semua paslon, pemilih ingin menunjukkan ekspresi tidak suka. Ekspresi tidak suka ini bisa ditujukan kepada kedua paslon ataupun kepada hal-hal terkait pemilu. Namun, hal berbeda pada coblos banyak pada satu kolom paslon. Hal tersebut seharusnya sah menurut peraturan KPU. Multitafsir peraturan KPU dan kompetensi petugas KPPS dinilai menjadi penyebab tidak sahnya surat suara (Karim, et al., 2016).

Pola coblos banyak ini dianggap sebagai pesan ekspresi politik dari pemilih. Pendapat bahwa pola ini merupakan bentuk ekspresi politik diperkuat oleh argumen Widi; perwakilan kelompok difabel SIGAB. Widi menyebutkan bahwa pemilih difabel biasanya menunjukkan ekspresi politik dengan mencoblos berulang kali. Mereka senang karena dapat terlibat dalam pemilu. Pemilih difabel ini dahulu seringkali tercederai haknya karena tidak dapat ikut serta menggunakan hak pilih.

Gambar 3. Coblos Banyak A.



Sumber: Dokumentasi Tim PolGov.

Argumen tersebut jelas menyiratkan bahwa pola ini membawa pesan berupa ekspresi politik. Selain ekspresi senang, bagi pemilih lain pola ini juga dapat bermakna sebagai ekspresi setuju ataupun suka. Dari gambar 4, terdapat pola coblos berbentuk hati diantara dua pasangan calon. Bentuk dan letak tersebut menekankan bahwa pemilih menyukai kedua pasangan calon. Selain itu terdapat pola coblos membentuk tulisan “OK” yang mengindikasikan ekspresi setuju dengan salah satu calon. Peraturan KPU yang tidak melarang adanya coblos banyak dengan syarat masih di dalam kotak pasangan calon, membuat pemilih memiliki kesempatan untuk menunjukkan ekspresi tersebut. Secara prosedural dia tidak melanggar aturan, dan secara substansial pesan pemilih tersampaikan.

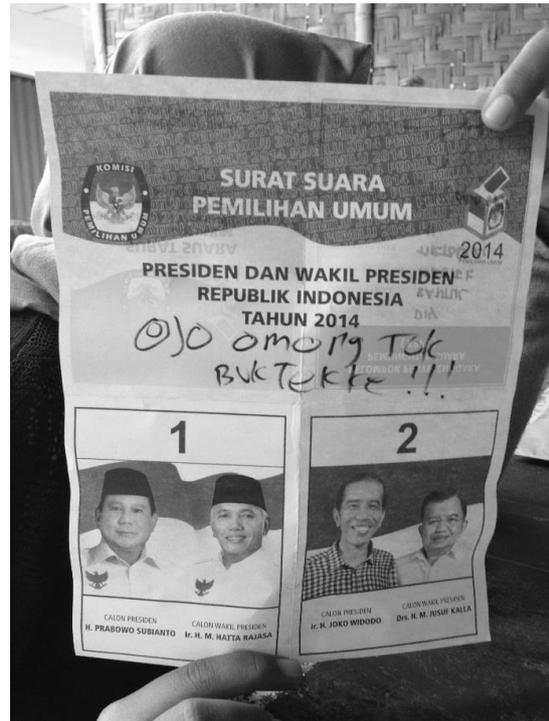
Adanya Tulisan atau Gambar pada Surat Suara

Pola ketiga ini memiliki bentuk yang berlainan dengan dua pola sebelumnya. Pesan di dalam kedua pola sebelumnya terkesan implisit dan sangat membutuhkan *framing* dalam melihat makna. Sedangkan, pesan didalam pola ini sangatlah eksplisit karena dituliskan atau digambar. Namun, dalam melihat makna juga membutuhkan *framing* untuk meringkaskan pesan yang disampaikan. “*Ojo Omong Tok Buktekke!!!*”

Gambar tersebut merupakan surat suara tidak sah yang di dalamnya terdapat tulisan “*Ojo Omong Tok Buktekke!!!*” atau yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti “*Jangan bicara saja, buktikan!!!.*” Bahasa Jawa yang digunakan dalam gambar tersebut menunjukkan identitas dari pemilih. Pemilih dapat diidentifikasi sebagai orang Jawa dan masyarakat asli; bukan pendatang. Pesan tersebut juga menandakan bahwa orang tersebut memiliki pengetahuan politik yang cukup memadai.

Pesan yang disampaikan dalam gambar tersebut eksplisit dan sangatlah jelas. Pemilih merasa bahwa kedua pasangan calon hanya memberikan janji yang belum tentu bisa dibuktikan. Dalam kalimat tersebut juga disertai tanda seru berjumlah tiga yang mempertegas dan memberi penekanan.

Gambar 4. *Ojo Omong Tok Buktekke!!!*



Sumber: Dokumentasi Tim PolGov.

Selain mempertegas dan memberi penekanan pada kalimat, tanda seru tersebut jika dikaitkan dengan kalimat yang ada juga mengisyaratkan ada luapan emosi dari pemilih. Pemilih sepertinya merasa jengah dengan aktivitas politik pra pemilu yang dilakukan oleh kedua pasangan calon. Aktivitas pra pemilu biasanya diisi dengan kampanye para calon sebagai sarana menjual janji-janji politis. Selain jengah, penekanan pada kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa pemilih kecewa dengan pemerintahan sebelum-sebelumnya. Sehingga makna yang terkesan dari kalimat tersebut “*Mau yang jadi siapa pun, tidak ada artinya. Mereka yang terpilih tidak pernah menepati janji-janji saat kampanye.*”

Jika dikaitkan dengan realitas sosial yang ada, janji-janji politik (sebagian kecil

maupun besar) saat kampanye seringkali tidak dapat dipenuhi. Janji-janji politik tersebut seringkali mengabaikan kompleksitas hal seperti proporsi anggaran, kapasitas sumber daya manusia aparatur, dan banyaknya kepentingan aktor-aktor dalam pemerintahan. Hal tersebut seringkali yang tidak dipahami oleh calon kandidat maupun masyarakat. Terjadinya jarak ataupun perbedaan apa yang dibayangkan dan diharapkan masyarakat dengan kenyataan dilapangan membuat masyarakat kecewa. Sehingga anggapan janji-janji politik saat kampanye hanya sekedar bujukan tidak dapat disalahkan dan menjadi sesuatu yang melekat di masyarakat (Firmanzah, 2007). *Coretan Kacamata, Kumis, Jenggot dan Silang*.

Kedua gambar tersebut menunjukkan surat suara yang diberi coretan berbentuk kacamata, penutup satu mata, kumis, dan silang. Setiap tanda yang dibuat dalam gambar tersebut memiliki arti tersendiri. Kacamata, penutup satu mata, jenggot dan kumis merupakan benda yang berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan yakni sebagai penutup wajah. Kemudian tanda silang pada tengah gambar tersebut berada ditengah-tengah antar kolom calon dan semua tercoret.

Gambar 5. Coretan Muka



Sumber: Dokumentasi Tim PolGov.

Banyaknya coretan-coretan tersebut dapat dimaknai beragam. Pertama, pemilih merasa ekspresi dalam wajah kedua pasangan calon tersebut adalah palsu. Ekspresi palsu kedua pasangan calon tersebut kemudian oleh pemilih dipertegas dengan memberikan coretan berbentuk kacamata, penutup satu mata, kumis, dan jenggot. Hal inilah yang ingin ditekankan oleh pemilih, bahwa kedua pasangan calon tidak menampilkan “wajah asli” mereka, penuh kepalsuan dan pencitraan. Kedua, pemilih menggambarkan kedua pasangan calon sepertinya halnya “badut” politik. Gambar itu kemudian diperjelas oleh pemilih dengan mencoret-coret kedua pasangan calon. Coret-coretan tersebut menghasilkan gambar layaknya badut. Ketiga, pemilih merasa keduanya merupakan “perampok” kekayaan negara. Gambar kedua dengan coretan penutup satu mata dan jenggot memberi gambaran layaknya bajak laut. Bajak laut adalah sosok perampok yang sering menjarah kapal laut. Segala bentuk coretan tersebut kemudian ditambah dengan tanda silang untuk menekankan kembali ketidaksetujuan terhadap kedua pasangan calon. Tanda silang dalam keseharian sering dimaknai sebagai tanda salah, kekeliruan, atau tidak setuju.

Pilpres 2014 yang hanya menampilkan dua pasang calon seringkali dipenuhi dengan pertarungan citra (VOA Indonesia, 2014). Pencitraan yang dilakukan oleh para calon seolah-olah membagi dunia menjadi dua hal yang kontras. Jika salah satu

pihak mencitrakan diri sebagai orang yang sederhana, pihak yang lain secara otomatis mendapat citra tidak sederhana. Selain sibuk mencitrakan diri sendiri, para calon seringkali sibuk merusak citra lawannya. Salah satu pihak menyerang pihak lain dengan isu anti-Islam, komunis, liberal, antek asing, anti-nasionalis dan pengkhianat jabatan. Kemudian dibalas dengan isu pelanggar HAM, antek Orde Baru, kacung Islamis, dan kunyuk fasis. Pertarungan tersebut terkesan sangat riuh dan menjadi lelucon seperti halnya badut. Energi para calon seringkali habis mengurus citranya dan merusak citra lawannya, bukan memikirkan hal-hal substantif seperti program dan kebijakan.

“Saya Pilih Syariah dan Khilafah”

Gambar 6. Saya Pilih Syariah dan Khilafah



Sumber: Dokumentasi Tim PolGov.

Gambar tersebut menunjukkan surat suara yang tidak dicoblos namun diberi tulisan “*Saya Pilih Syariah & Khilafah*”. Tulisan pada gambar tersebut ditulis dengan huruf kapital. Syariah memiliki arti ajaran Islam

berupa norma-norma ilahiyah yang mengatur tingkah laku individual maupun kolektif. Sedangkan khilafah memiliki arti sebuah sistem kepemimpinan umat, dengan menggunakan Islam sebagai Ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Al-Quran, Hadist, Ijma dan Qiyas.

Pesan yang ingin disampaikan dalam gambar tersebut terletak pada kalimat yang dituliskan pada surat suara. Pemilih ingin menekankan pada ketidaksetujuannya terhadap sistem pemerintahan dan mekanisme pemilu. Penekanan tersebut dilakukan dengan tidak mencoblos salah satu pasangan calon dan menuliskan “*Saya Pilih Syariah & Khilafah*”. Ketidaksetujuan tersebut dipertegas dengan huruf kapital yang digunakan dalam tulisan. Selain itu pilihan kata yang digunakan sangatlah jelas dan tersurat tentang apa yang apa yang diinginkan oleh pemilih.

Jika dikaitkan dengan isu selama ini, kalimat pernyataan pada gambar tersebut mengacu pada pertarungan wacana demokrasi vs khilafah. Demokrasi mendapat pertentangan keras dari pihak-pihak Islam tertentu karena sistem ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketidaksesuaian dengan ajaran islam terletak pada paham kedaulatan tertinggi di tangan rakyat bukan pada hukum Islam, berlandaskan sekularisme bukan aqidah Islam, kebenaran merupakan suara terbanyak bukan sesuai nash syara’, dan segala peraturan demokrasi bukan mengacu pada Qur’an & Sunnah. Wacana khilafa

tersebut biasanya menguat saat diberlangsungkannya pemilu. Pemilu dianggap sebagai simbol demokrasi yang harus ditentang dan diperangi (Hizbut Tahrir, 2014).

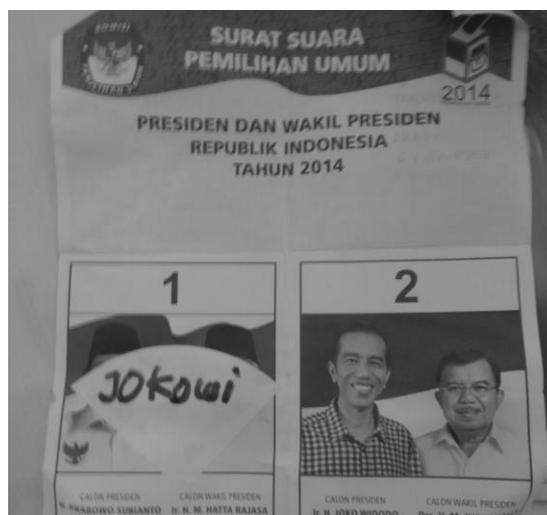
“Jokowi” pada Kolom Pasangan Prabowo-Hatta

Surat suara tidak sah tersebut tidak dicoblos namun wajah pada pasangan calon nomor urut satu ditempel stiker putih dan adanya tulisan “*Jokowi*”. Stiker yang ditulisi “*Jokowi*” tersebut menutup seluruh muka Prabowo-Hatta. Wajah Prabowo-Hatta yang tertutup tersebut membuat surat suara yang awalnya menyajikan foto Prabowo-Hatta pada nomor urut 1 dan Jokowi-Kalla pada nomor 2, menjadi tulisan “*Jokowi*” pada nomor urut 1 dan Jokowi-Kalla pada nomor urut 2.

Pesan yang ingin disampaikan dalam gambar tersebut adalah Jokowi merupakan satu-satunya calon yang layak maju dalam Pilpres 2014. Pesan tersebut dirangkai dalam tempelan stiker pada wajah Prabowo-Hatta dan tulisan “*Jokowi*”. Stiker tulisan “*Jokowi*” yang menutupi muka Prabowo-Hatta menekankan bahwa Prabowo-Hatta tidak layak maju dalam Pilpres 2014. Makna tersebut disampaikan dengan cara yang cukup jelas dengan hanya menuliskan kata “*Jokowi*”. Namun, makna yang ditangkap disini memiliki keterbatasan. Pemilih hanya menyampaikan bahwa Jokowi-Kalla pantas maju dalam Pilpres 2014 sedangkan Prabowo-Hatta tidak pantas. Pemilih tidak menunjukkan

sikapnya apakah dia memilih Jokowi dan layak menjadi Presiden atau tidak.

Gambar 8. Sticker Jokowi



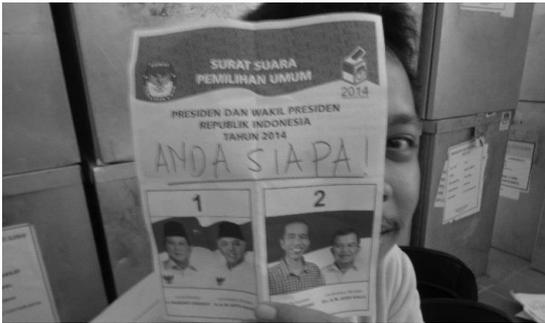
Sumber: Dokumentasi Tim PolGov.

Anggapan atas ketidaklayakan Prabowo maju dalam Pilpres 2014 sangat terkait dengan isu-isu HAM yang menyanderanya. Isu-isu HAM seperti kasus penculikan aktivis 1997/1998 selain menyandera jaga mengancam elektabilitas Prabowo saat itu. Survei yang dilakukan LSI menyimpulkan, 32,8% pemilih telah mendengar isu Prabowo terlibat dalam penculikan. LSI menyebut kasus tersebut dengan ‘*aktivis gate*’. LSI menyimpulkan, pada Juni 2014, 51,5% publik percaya kalau Prabowo terlibat dalam kasus HAM 1997/1998. Hanya 37,6% yang tidak percaya kalau Prabowo terlibat. Dampaknya adalah 56,8% publik yang mendengar kasus keterlibatan Prabowo bakal mempertimbangkan niatnya dalam mendukung Prabowo. Hanya 34,3% yang menyatakan tidak terpengaruh dan mantap memilih Prabowo (Berita Satu, 2014). Dari

survey LSI tersebut, framing isu “*aktivis gate*” sangat mempengaruhi persepsi publik atas kelayakan Prabowo maju dalam Pilpres 2014.

“*Anda Siapa!*”

Gambar 9. *Anda Siapa!*



Sumber: Dokumentasi Tim PolGov.

Gambar tersebut menunjukkan surat suara yang tidak dicoblos dan diberi tulisan “*Anda Siapa!*”. Tulisan tersebut ditulis dengan huruf kapital disertai tanda seru. Jika dilihat dari struktur kalimatnya, kalimat tersebut bukanlah pertanyaan walaupun di dalam kalimat terdapat kata tanya, “*siapa*”. Kalimat tersebut lebih ke kalimat penegasan karena disertai tanda seru dan ditulis dengan huruf kapital.

Pesan yang ingin disampaikan dalam gambar tersebut adalah pemilih ingin menegaskan ketidaktahuannya terhadap calon. Selain itu, gambar tersebut memberi kesan bahwa pemilih tidak peduli dengan siapa calon yang maju dan proses pemilu yang berlangsung. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian pemilih sangat jelas terlihat dalam kalimat yang dituliskan. Kalimat tersebut dirangkai dengan huruf kapital dan tanda seru di akhir. Kalimat “*Anda Siapa!*”

dalam keseharian selain digunakan untuk menunjukkan sikap tidak peduli, menantang, atau melawan pihak lain. Biasanya pihak lain disini mencoba memberikan aturan atau tawaran tertentu, namun mendapat pertentangan atau perlawanan.

Pesan dalam gambar tersebut sangat terkait dengan persepsi masyarakat selama ini yang menganggap calon kandidat hanya akan turun ke tengah masyarakat saat pemilu saja (Kompas, 2016). Masyarakat sering dijadikan komoditi dalam pemilu untuk mendulang suara namun setelah itu mereka dilupakan. Perilaku calon kandidat tersebut menunjukkan masyarakat hanya dijadikan alat untuk mencapai kepentingan pribadi. Perilaku tersebut mengkhianati dan tidak merepresentasikan suara rakyat.

“*Luwih Rusuh – Kampanye Rusuh*”

Gambar tersebut menunjukkan surat suara yang dengan tulisan “*luwih rusuh-kampanye rusuh*”. Pesan yang ingin disampaikan disini bahwa kampanye dan penyelenggaraan Pilpres 2014 lebih rusuh atau lebih sengit dibandingkan penyelenggaraan Pilpres sebelumnya. Pesan tersebut ditulis sangat jelas dan sebagai poin terpenting penyampaian makna.

Gambar 10. *Luwih Rusuh Kampanye Rusuh*



Sumber: Dokumentasi Tim PolGov.

Pilpres 2014 memang dikenal pemilu paling berisik jika dibandingkan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Calon yang mengikuti Pilpres 2014 hanya berjumlah dua pasang, membuat masyarakat terbelah menjadi dua kubu. Jika satu kubu pro, maka secara otomatis kubu yang lain kontra. Jika satu kubu dianggap baik, maka secara langsung kubu lainnya dianggap tidak baik. Seringkali masyarakat dalam melihat Pilpres 2014 saat itu sebatas dua sisi, hitam – putih, baik – buruk, santun – tidak santun. Bahkan sampai sekarang, pengkotak-kotakan paska Pilpres 2014 masih terasa; antara pro pemerintah dengan kontra pemerintah (Kompas, 2016).

Selain itu kehadiran media sosial baru seperti facebook, twitter, instagram membuat kegaduhan pilpres 2014 sangat terasa. Pilpres 2014 merupakan pemilu dengan penggunaan media sosial paling masif sepanjang sejarah pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan media sosial sebagai media baru masyarakat dalam mendapatkan, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Namun, tidak semua informasi yang beredar di media sosial tersebut benar dan valid. Banyak *black campaign* dan *negative campaign* yang berseliweran tiada henti dan mudah diakses oleh semua orang. Hal tersebut yang membuat implikasi langsung dalam kehidupan nyata (BBC, 2014). Kampanye dan penyelenggaraan Pilpres 2014 terkesan sangat riuh, rusuh, dan gaduh di media sosial maupun di kehidupan nyata.

“ASU” dan Coretan Berbentuk Kelamin

Gambar tersebut menunjukkan surat suara yang diberi coretan berbentuk kelamin laki-laki, kelamin perempuan, dan tulisan “ASU”. Pesan yang ingin disampaikan dalam gambar tersebut dapat dimaknai dalam dua hal. Pertama, gambar tersebut dapat dimaknai bahwa kedua pasangan calon hanya mengejar nafsu jabatan dan kekuasaan. Pemilu bagi dia hanya sarana memuaskan sahwat politik para elite. Pesan tersebut dirangkai dengan coretan berbentuk alat kelamin laki-laki dan perempuan. Alat kelamin pada gambar tersebut merupakan simbol atas nafsu dan kuasa. Kedua, gambar tersebut dapat dimaknai sebagai umpatan terhadap kondisi yang dialami masyarakat saat ini. Alat kelamin dan kata “ASU” merupakan umpatan yang sering digunakan oleh warga asli Jogja. “ASU” sebenarnya secara harfiah memiliki arti “Anjing”. Umpatan ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kekecewaan atau kemarahan terhadap subyek atau obyek pada kondisi tertentu.

Gambar 11. Umpatan dan Alat Kelamin



Sumber: Dokumentasi Tim PolGov

Pesan tersebut disampaikan dengan sangat jelas. Coretan yang berbentuk alat kelamin laki – laki dan perempuan serta

tulisan “ASU” tersebut ditulis dengan besar dan hampir memenuhi bagian kertas serta penggunaan huruf kapital. Hal ini menandakan, ada pesan yang teramat kuat atas kekecewaan dan kemarahan terhadap pemerintahan selama ini ataupun kehidupan politik dalam arti yang luas. Selain itu, pesan tersebut memiliki identitas yang cukup kuat terhadap siapa aktor yang menulisnya; orang Jogja asli.

Kekecewaan dan kemarahan atas pemerintahan ataupun kondisi politik tersebut merupakan kondisi yang sering dialami di level *grassroot*. Politik dewasa ini seringkali dicap sebagai politik yang hanya menampilkan wajah atau figur populer dibanding pertarungan ide dan program. Selain itu banyaknya kasus korupsi, pengangguran, proyek mangkrak, dan kelakuan elite yang tidak pro rakyat menambah apatisme masyarakat terhadap politik (Sindo News, 2012). Bentuk apatisme masyarakat dapat dilihat melalui umpatan-umpatan dan makna dari gambar tersebut.

Gambar Kolom Pasangan Nomor 3 kemudian Dicoblos

Gambar tersebut menunjukkan surat suara yang digambar kolom urut nomor tiga kemudian dicoblos. Pesan yang ingin disampaikan dalam gambar tersebut adalah kekecewaan terhadap kedua pasangan calon ataupun kedua pasangan calon tidak ada yang sesuai harapannya. Pesan tersebut sangat kuat dan sangat cerdas dalam penyampaianya.

Kekecewaan dan ketidaksesuaian terhadap calon yang ada tergambar jelas dengan menggambar kolom ketiga yang kemudian dicoblos. Pemilih mengisyaratkan keinginannya terhadap hadirnya calon lain dalam Pilpres 2014.

Kekecewaan masyarakat akan calon yang itu-itu saja tergambar jelas pada gambar tersebut. Prabowo pernah maju dalam pilpres 2009, sedangkan Hatta Rajasa pernah menjadi Menko Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Perhubungan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan Jokowi yang namanya melejit sejak menjadi walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta merupakan sosok populer. Namun, periode jabatan walikota Solo yang belum selesai (yang kemudian mecalonkan diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta) dan periode jabatan Gubernur DKI Jakarta yang baru dijalankan dua tahun, sedikit banyak mempengaruhi persepsi publik. Nama Jusuf Kalla juga tidaklah asing. Dia pernah menjadi wakil presiden 2004 – 2009, calon presiden dalam Pilpres 2009 namun kalah, kemudian maju lagi menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2014.

Gambar 12. Kolom Nomor 3



Sumber: Dokumentasi Tim PolGov.

Gambaran Pilpres 2014 yang hanya diikuti oleh aktor yang itu-itu saja membuat masyarakat tidak memiliki pilihan alternatif. Jika tidak Prabowo maka Jokowi yang dipilih, jika tidak A maka B. Masyarakat yang memiliki bayangan lain terkait siapa sosok Presiden Indonesia, tidak terakomodasi dalam hal ini. Gambar kolom nomor urut tiga memberi makna akan hal tersebut.

Refleksi atas *Protest Voting* pada Pemilu Presiden 2014

Analisa surat suara tidak sah pada Pemilu Presiden 2014 menggunakan pendekatan interpretatif berhasil membaca makna pesan dari surat suara tidak sah. Beragam makna pesan yang selama ini tidak terbaca oleh sistem, dapat dijelaskan melalui pendekatan interpretatif ini. Pesan yang ada di dalam surat suara, apapun bentuknya tetap merupakan suara rakyat yang harus tersampaikan dan didengar. Pertama, pesan atas indikasi terjadinya politik uang *post-elections*. Indikasi adanya politik uang *post-elections* adalah ditemukannya pola gambar muka paslon yang hilang dan ditemukan di seluruh kabupaten/kota di DIY. Gambar muka paslon yang hilang sengaja disobek melingkar mengikuti muka paslon. Bahkan ada gambar muka paslon yang terpotong rapih ditengah seperti menggunakan alat tertentu. Ketika hal ini dikonfirmasi ke para petugas KPPS, mereka tidak menemukan potongan gambar muka paslon yang hilang tersebut. Hal ini mengindikasikan potongan gambar muka

dibawa oleh pemilih. Ketika isu tersebut dikonfirmasi ke Bambang Eka; mantan anggota Bawaslu RI, beliau tidak menyangkal jika memang terjadi politik uang *post-elections*. Pola yang sama pernah ia temukan di Papua dan terbukti sebagai politik uang *post-elections*.

Kedua, adanya ekspresi senang pemilih yang disampaikan dalam surat suara. Ekspresi ini ditunjukkan dengan mencoblos berulang kali pada surat suara. Hal ini dikonfirmasi oleh Widi, perwakilan dari kelompok difabel. Menurut beliau, kelompok minoritas sangat senang mengikuti pemilu. Melalui pemilu, mereka merasa setara dengan mayoritas orang lain. Selain itu, mereka merasa dihormati oleh negara dan memiliki kedudukan yang sama. Ekspresi senang tersebut dilampiaskan melalui pemilu yang hanya bisa diikuti pada waktu-waktu tertentu. Kesempatan yang ada untuk menunjukkan kesetaraan tersebut, mereka maksimalkan dengan menunjukkan ekspresi senang melalui mencoblos berulang kali.

Ketiga, adanya umpatan dan hujatan yang disampaikan pemilih. Umpatan dan hujatan ini merupakan respon pemilih terhadap kondisi sosial yang ia alami. Pemilih seringkali merasa kecewa terhadap kondisi sosial yang tidak banyak berubah paska pemilu. Sebelum pilkada, para kandidat dan partai ramai-ramai menebar janji dan berbaik hati menawarkan bantuan. Namun, ketika pilkada telah usai janji-janji yang diberikan jarang untuk ditepati. Kandidat yang terpilih

seolah-olah yang berorientasi pada kekuasaan dan bukan kepentingan masyarakat yang memilihnya. Hal ini memunculkan respon dari pemilih dalam bentuk umpatan dan hujatan dalam surat suara. Umpatan dan hujatan tersebut ditulis secara eksplisit seperti “*Ojo Omong Tok Bukteke!!!*”, “*ANDA SIAPA!*”, “*Luwih Rusuh – Kampanye Rusuh*”, “*ASU*” dan coretan berbentuk kelamin.

Keempat, adanya penolakan terhadap kandidat. Pola penolakan terhadap kandidat terbagi menjadi dua yakni, menolak salah satu kandidat dan menolak seluruh kandidat. Pemilih nampak menunjukkan penolakan terhadap salah satu kandidat dengan menempelkan stiker pada gambar muka Prabowo – Hatta. Pemilih kemudian pemilih menulis “*JOKOWI*” dengan huruf kapital pada stiker tersebut. Pola kedua, pemilih menunjukkan penolakan terhadap semua calon dengan memberikan coretan berbentuk kacamata, kumis, jenggot dan silang. Coretan yang membentuk benda-benda tersebut menutupi muka semua paslon. Hal ini secara jelas menunjukkan ketidaksukaan dan penolakan terhadap semua kandidat. Selain itu, pemilih menunjukkan penolakan terhadap semua paslon dengan tidak mencoblos kedua paslon yang ada, namun membuat kolom baru. Pemilih membuat kolom baru, memberikan angka tiga, kemudian mencoblosnya. Hal ini selain menunjukkan penolakan terhadap kedua paslon, pemilih mengindikasikan keinginan hadirnya paslon ketiga diluar paslon yang ada. Pilpres yang

sangat menentukan jalannya pemerintahan nasional lima tahun mendatang hanya diikuti oleh dua paslon. Hal ini memberi gambaran jelas bahwa masyarakat jenuh terhadap kedua paslon dan menginginkan sosok baru. Seperti yang diketahui, Prabowo Subianto sudah pernah mengikuti pilpres namun kalah. Sedangkan Joko Widodo belum selesai menunaikan amanat rakyat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pemilih menunjukkan kejenuhan dan penolakan tersebut melalui pesan dalam bentuk coretan pada semua paslon dan coretan berbentuk kolom baru.

Kelima, adanya penolakan terhadap sistem pemilu saat ini. Sebagian masyarakat menyampaikan penolakan terhadap hal yang jauh lebih besar terkait pemilu yakni sistem pemilu. Pemilih menunjukkan penolakan tersebut dengan menuliskan “*Saya Pilih Syariah dan Khilafah*” pada surat suara. Pesan tersebut dengan jelas bahwa pemilih tidak setuju terhadap sistem untuk memilih pemimpin. Selain pesan penolakan, pemilih juga menegaskan sistem yang seharusnya dijalankan. Pemilih berpendapat sistem khilafah lebih baik daripada sistem pemilu saat ini dalam menentukan pemimpin.

Makna atas pesan tersebut setidaknya menggambarkan kondisi yang terjadi di masyarakat saat Pemilu Presiden 2014 terjadi. Dalam pemilu, masyarakat tidak hanya sekedar mencoblos atau tidak mencoblos, memilih atau tidak memilih. Suara masyarakat dalam pemilu tidak hanya ditunjukkan dengan sahnya suara yang diberikan pada surat suara,

namun suara tidak sah pun memiliki “suara” dari masyarakat. Kegagalan sistem mewadahi “suara” tersebut menodai esensi dari pemilu itu sendiri. Pemilu yang sejatinya sarana menyampaikan suara rakyat dalam memilih pemimpin, gagal membaca “suara” yang tersembunyi pada surat suara tidak sah. Sistem pemilu saat ini hanya mengakomodir suara yang diberikan secara sah sesuai prosedur. Padahal diluar suara sah tersebut, terdapat “suara” didalam surat suara tidak sah yang juga wajib diakomodir.

Artikel ini setidaknya menunjukkan ada dua permasalahan utama dalam melihat pesan-pesan tersembunyi surat suara tidak sah. Pertama, *protest voting* selama ini tidak cukup menjelaskan bentuk protes pada surat suara pilpres 2014 di DIY. Bentuk protes di surat suara pilpres 2014 tidak seperti apa yang dibayangkan *protes voting* selama ini. Bentuk protes tidak menggunakan *voting* sebagai alat protes. Protes menggunakan tanda dan simbol yang disematkan pada surat suara. Surat suara tersebut diberi tulisan, gambar, bahkan sobekan sedemikian rupa dan menimbulkan makna tertentu. Selain itu, protes tidak dilakukan dengan memilih kandidat yang sebenarnya tidak disukai sebagai bentuk protes kepada kandidat yang disukai. Protes dilakukan dengan memberikan pesan dan tanda langsung kepada kandidat yang dikritik pada surat suara terlepas kandidat tersebut disukai atau tidak disukai. Kedua, suara protes pada surat suara tidak sah yang merupakan suara rakyat tidak terakomodir dalam sistem

pemilu. Sistem pemilu saat ini menyamaratakan cara pandang terhadap surat suara tidak sah. Sistem pemilu tidak memandang suara tidak sah sebagai “suara rakyat” yang merupakan esensi dari pemilu. Suara tidak sah apapun bentuknya; memiliki atau tidak memiliki nilai, dikelompokkan menjadi satu ke dalam satu kelompok besar suara tidak sah; tidak sah maka tidak dihitung.

Penutup

Pada bagian ini disajikan dua rekomendasi utama merespon dua permasalahan di atas. Pertama, gagasan perbaikan atas konsep *protest voting* selama ini. Kedua, gagasan perbaikan sistem agar suara rakyat dapat terwadahi dalam Pemilu selanjutnya. Konsep *protest voting* selama ini menjelaskan tindakan *voting* untuk menyampaikan protes atau ketidaksetujuannya dengan hal-hal yang terkait pemilu. *Voting* dalam konsep tersebut bukan dimaksudkan untuk memenangkan kandidat atau partai tertentu, namun untuk memprotes kandidat atau partai yang sebenarnya disukai. Pemilih melakukan *protest voting* karena pemilih menganggap kandidat atau partai mengabaikan isu-isu tertentu. Secara lebih luas, *protest voting* juga dapat digunakan untuk memprotes sistem pemilu secara keseluruhan. Konsep *protest voting* ini secara khusus mensyaratkan *voting* sebagai elemen utama dalam kerangka protes. Protes terhadap hal-hal terkait pemilu tidak hanya dapat dilakukan dengan *voting* saja.

Temuan pada surat suara tidak sah pada pilpres 2014 menunjukkan bentuk protes yang jauh berbeda dari apa yang dibayangkan oleh peneliti sebelumnya yang menulis terkait *protest voting*. Konsep *protest voting* selama ini tidak sepenuhnya salah. Pemilih memang memprotes hal-hal terkait pemilu seperti kandidat, keadaan sosial politik, ataupun sistem pemilu secara lebih luas, namun sifat protesnya tidak sekaku apa yang dibayangkan oleh Kselman & Niou dan peneliti lain. Protes terkait pemilu tidak melulu dilakukan dengan *voting* namun dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: dengan tulisan pada surat suara, coretan gambar, stiker, atau bahkan sobekan tertentu. Hal ini memperkaya sekaligus mengkritik konsep *protest voting* selama ini. Konsep *protest voting* harus lebih luas dan lebih cair, yakni segala hal protes pemilih yang berkaitan dengan pemilu yang dapat disampaikan dengan media dan cara apapun tidak hanya melalui *voting* saat pemilu itu berlangsung.

Selain itu, penyelenggara pemilu perlu melakukan perbaikan sistem kepemiluan. Esensi pemilu sebagai sarana menyampaikan suara rakyat untuk memilih pemimpin, harus benar-benar diperhatikan. Selama ini, penyelenggaraan pemilu hanya berfokus pada surat suara yang sah dalam melihat suara rakyat. Sistem pemilu didesain hanya untuk mengakomodir suara yang sah secara prosedur namun abai terhadap suara yang diberikan tidak sesuai prosedur. Surat suara tidak sah tersebut tidak pernah menjadi

kajian serius dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus berani menyuarakan atau menyampaikan hasil analisis pesan, teks dan gambar dalam surat suara tidak sah sebagai peringatan atau pembelajaran kepada para penyelenggara negara dan pengambil kebijakan lainnya.

Dalam pemaparan surat suara tidak sah di atas, juga ditemukan penolakan atas semua kandidat yang ada. Selama ini, sistem pemilu hanya menyediakan kolom atau ruang untuk memilih kandidat namun tidak pernah menyediakan kolom atau ruang untuk menolak kandidat. Padahal suara penolakan tersebut juga merupakan bagian dari suara rakyat sebagai esensi dari pemilu itu sendiri. Selama ini masyarakat menyampaikan suara penolakan dengan tidak mencoblos, mencoblos lebih dari satu atau semua kandidat, atau bahkan merusak surat suara. Namun pada akhirnya suara penolakan atau protes tersebut hanya akan dianggap suara tidak sah oleh sistem. Sistem pemilu tidak mampu membedakan suara tidak sah yang memang tidak sesuai regulasi dengan suara tidak sah yang dimaksudkan sebagai bentuk protes. Sistem melihat suara tidak sah sebagai sesuatu yang sama; tidak sah maka tidak dihitung.

Untuk mengakomodir suara penolakan atau protes atas semua kandidat, penyelenggara pemilu hendaknya memperbaiki sistem pemilu. Penyelenggara harus mulai memikirkan kolom atau ruang pada surat suara untuk mewedahi suara

penolakan atau protes tersebut. Belajar dari beberapa negara seperti India, Kanada, ataupun negara bagian Nevada, penyelenggara pemilu dapat mengadaptasi konsep *NOTA (None of The Above) Voting*. Dalam konsep *NOTA Voting*, penyelenggara pemilu memberi ruang kepada pemilih untuk menolak semua kandidat yang tersedia. Kolom yang tersedia pada surat suara tidak hanya ditujukan untuk memilih kandidat, namun ada kolom atau ruang untuk menolak kandidat. Dengan sistem tersebut, penyelenggara pemilu dapat membedakan suara tidak sah yang bertujuan *abstain*, salah prosedural atau dengan tujuan menolak semua kandidat. Dengan sistem ini juga, memungkinkan pemilih untuk memberi sinyal ketidakpuasan yang lebih baik terhadap kandidat (Damore, Waters, & Bowler, 2012).

Tulisan ini telah membahas pesan-pesan tersembunyi yang tidak mampu terdeteksi oleh sistem yang kemudian oleh peneliti dikelompokkan menjadi lima kategori. Lima kategori tersebut adalah pesan atas indikasi terjadinya politik uang *post-elections*, ekspresi senang pemilih yang disampaikan dalam surat suara, adanya umpatan dan hujatan terhadap kondisi sosial, adanya penolakan terhadap kandidat, dan adanya penolakan terhadap sistem pemilu saat ini. Melihat aturan pemilu saat ini, pesan-pesan yang disampaikan rakyat akan lebih banyak ditemukan di surat suara tidak sah. Menimbang hal tersebut, penyelenggara pemilu harusnya mulai memperbaiki sistem pemilu saat ini. Penyelenggara pemilih harus

meningkatkan dan memperluas fokus, tidak hanya pada surat suara yang sah melainkan surat suara tidak sah. Pesan-pesan tersebut menggambarkan kondisi sosial yang terjadi saat pemilu bahkan dapat menjadi bahan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu secara lebih luas. Penyelenggara pemilu harus berani menyampaikan pesan yang termuat dalam suara tidak sah sebagai peringatan atau pembelajaran kepada para penyelenggara negara dan pengambil kebijakan lainnya. Selama ini suara tidak sah hanya dianggap “sampah”, tidak memiliki esensi kepemiluan sama sekali, padahal di dalamnya terkandung pesan dari masyarakat yang sifatnya sangat cair. Penyelenggara pemilu harus menyediakan mekanisme untuk mengoptimalkan suara tidak sah tersebut paska pemilu.

Selain itu penyelenggara pemilu harus mulai menimbang untuk menyediakan kolom atau ruang untuk menampung suara protes atau penolakan terhadap kandidat yang tersedia. Salah satunya adalah dengan konsep *NOTA Voting*. Konsep *NOTA Voting* memungkinkan penyelenggara pemilu dapat membedakan suara tidak sah yang bertujuan *abstain*, salah prosedural atau dengan tujuan menolak semua kandidat.

Daftar Pustaka

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia. Yogyakarta: PolGov.

- BBC. (5 Juli 2014). Diambil kembali dari BBC:
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140704_pilpres_medsos.
- Berita Satu. (2014, June 15). Diambil kembali dari Berita Satu:
<http://www.beritasatu.com/nasional/190273-lsi-prabowo-makin-sulit-kejar-elektabilitas-jokowi.html>.
- Bowler, S., & Lanoue, D. J. (1992). Strategic and Protest Voting for Third Parties: The Case of the Canadian NDP. *The Western Political Quarterly*, Vol. 45, No. 2, 485-499.
- Eriyanto. (2008). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Firmanzah. (2007). *Marketing politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hizbut Tahrir. (2014, April 23). Diambil kembali dari Hizbut Tahrir:
<https://hizbut-tahrir.or.id/2014/04/23/pemilu-untuk-perubahan-ibarat-menggantang-asap>.
- Hooghe, M., & Dassonneville, R. (2016). A Spiral of Distrust: A Panel Study on the Relation between Political Distrust and Protest Voting in Belgium. *Government and Opposition*, 1-27.
- Kang, M. S. (2010). VOTING AS VETO. *Michigan Law Review*, Vol. 108, No. 7, 1221-1281.
- Kang, W.-T. (2004). Protest Voting and Abstention Under Plurality Rule Elections: An Alternative Public Choice Approach. *Journal of Theoretical Politics* 16(1), 79-102.
- Karim, A. G., Rahmawati, D., Jamson, U. N., Yunanto, A. G., Fimmastuti, D. R., & Prasetyo, W. (2016). *Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government (PolGov).
- Kompas. (2016, October 15). Diambil kembali dari Kompas:
<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/15/19211651/anies.masih.banyak.yang.mengira.sekarang.pilpres.2014>.
- Kompas. (2016, November 18). Diambil kembali dari Kompas:
<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/18/17273181/kalau.pemilihan.seperti.ini.saja.kami.warga.miskin.dicari-cari>.
- Kselman, D., & Niou, E. (2010). Protest Voting in Plurality Elections: A Theory of Voter Signaling. *Public Choice*, 395-418.
- Kselman, D., & Niou, E. (2010). *Strategic Voting in Plurality Elections*.

Political Analysis, Vol. 18, No. 2,
227-244.

McAllister, I., & White, S. (2008). Voting
'Against All' in Postcommunist
Russia. *Europe-Asia Studies* Vol.
60, No. 1, 67-87.

Medium. (6 Agustus 2016). Diambil kembali
dari Medium:
[https://medium.com/@cshirky/there
s-no-such-thing-as-a-protest-vote-
c2fdacabd704#.4bkg9jhfa](https://medium.com/@cshirky/there-s-no-such-thing-as-a-protest-vote-c2fdacabd704#.4bkg9jhfa).

Republika. (11 Mei 2014). Diambil kembali
dari Republika:
[http://www.republika.co.id/berita/pe
milu/hot-politic/14/05/11/n5etia-
politik-uang-dominasi-pelanggaran-
pemilu-2014](http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/05/11/n5etia-politik-uang-dominasi-pelanggaran-pemilu-2014).